STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI
(Studi Kasus pada Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

SKRIPSI

OLEH:
ARISTO LERE BILI
NIM: 2016210028

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2022

ABSTRAK

ARISTO LERE BILI. 2016210028. Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi Kasus pada Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu). Pembimbing utama: Drs. Sugeng Rusmiwari,M.,Si, Pembimbing pendamping: Dekki Umamur Rais, S.,Sos., M.,Soc.,Sc

Pemberdayaan Masyarakat pada hakikatnya adalah tentang memihak, mempersiapkan, dan membela untuk memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan petani seharusnya adalah untuk meningkatkan kapasitas yang melekat pada mereka sekaligus menciptakan kemungkinan tambahan bagi mereka untuk mengakses dan mendapatkan manfaat dari sumber daya produktif dan membangun perusahaan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (1) Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan pendekatan yang digunakan untuk memperkuat kelompok tani di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, mengkaji dan mengidentifikasi unsur-unsur yang membantu dan menghambat pemerintah desa dalam memberdayakan organisasi petani.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah melalui wawancara, observasi dan dokumen. Sumber data utama yang digunakan adalah hasil wawancara. Teknik analisis data yang digunakan meliputi tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Desa Sumbergondo tidak memiliki strategi khusus untuk melaksanakan pemberdayaan kelompok tani di desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Pemerintah Desa Sumbergondo memiliki fungsi sebagai perantara atau fasilitator yang menghubungkan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dengan anggota Kelompok Tani. Namun, Pemerintah Desa Sumbergondo melakukan strategi dengan mengembangkan potensi di bidang pembibitan dan pembuatan pupuk. Sedangkan dari aspek perlindungan, pemerintah Desa Sumbergondo telah memfasilitasi petani dengan membuat akta notaris yang memiliki kekuatan hukum. Faktor pendukung Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan kelompok tani di Desa Sumbergondo adalah kerjasama yang bagus dari anggota kelompok tani, koordinasi yang baik antara penyuluh pertanian dan desa yang yang baik, dan juga motivasi anggota kelompok tani yang bagus.Faktor penghambat Pemerintah Desa Sumbergondo dalam Pemberdayaan kelompok tani di Desa Sumbergondo adalah tidak adanya kehadiran kelompok tani dalam musrembang desa sehingga pemerintah desa tidak dapat langsung mendengar pendapat dari anggota kelompok tani yang menjadi subjek pemberdayaan

Kata Kunci: Strategi, Pemberdayaan, Kelompok Tani

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat pedesaan mewakili mayoritas sumber pendapatan utama penduduk desa, masyarakat pedesaan memainkan peran penting dalam industri pertanian. Di masa lalu, sektor pertanian Indonesia menawarkan kesempatan kerja paling besar. Karena pertanian terus menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar keluarga pedesaan, masih biasa ditemukan SDM yang ingin dan berkualitas untuk mengelolah pertanian di pedesaan. 39,68 juta orang Indonesia, atau 31,86 persen dari 124,54 juta penduduk usia kerja, bekerja di industri pertanian pada tahun 2017, (Suhariyanto, 2017:4), Selain memiliki warisan alam yang kaya akan rempah-rempah dan bahan makanan seperti beras, umbi-umbian, dan jagung, Pertanian merupakan industri utama di Indonesia. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani karena faktor lingkungan tersebut. Tanah subur di nusantara memiliki kemampuan untuk memberi kesempatan kepada penduduknya untuk bercocok tanam, memungkinkan sektor pertanian berkontribusi pada perdagangan lokal, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberdayakan masyarakat, mengembangkan kapasitas masyarakat, dan berdampak pada produksi pendapatan. Masyarakat harus bertanggung jawab atas proses ini, (Sumodiningrat, 2016:20).

Pemberdayaan masyarakat berdasarkan pemihakan, penyiapan, dan perlindungan untuk menjadikan rakyat berdaya. Pemberdayaan yang dibicarakan di sini adalah kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri, yang terlihat dari kecenderungan mereka untuk memproduksi dan mengkonsumsi barang-barang manufaktur. Dalam konteks ekonomi, fokus pada permintaan (konsumsi) sambil mencapai output (produksi) (*supply*), (Adisasmita, 2013: 127). Secara lebih praktis, undang-undang otonomi daerah mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mendorong melibatkan masyarakat dalam menerapkan pembangunan di semua disiplin ilmu, dengan mempertimbangkan masuknya desa dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota. . yang memiliki hubungan lebih dekat dengan masyarakat adalah

mereka yang terikat langsung dengannya. Kerangka kelembagaan dan prosedur operasional di semua tingkat pemerintahan, terutama pemerintah desa, dirancang dengan tujuan mengubah sistem pemerintahan desa. Hal ini memungkinkan terciptanya pemerintahan yang responsif terhadap perkembangan dan perubahan baru, (Sumodiningrat, 2016:86).

Suatu bangsa harus mampu menciptakan strategi pembangunan berkelanjutan jika ingin maju di era yang berkembang pesat ini. Pertumbuhan fisik atau sumber daya lain yang mendorong pemberdayaan masyarakat dapat menjadi bagian dari pembangunan ini. Tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan negaranya seluruhnya, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menegakkan hukum internasional. UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu pendekatan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan pembangunan nasional yang dituangkan dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Peningkatan seluruh aspek kehidupan nasional disebut pembangunan nasional, yang Pembangunan di bidang fisik, sosial, budaya, keamanan, ekonomi, serta pertahanan dan, serta pertumbuhan intelektual, (Adi, 2008:19).

Sektor pertanian memainkan peran penting dalam kerangka pembangunan ekonomi negara, oleh karena itu pembangunan ekonomi Indonesia difokuskan padanya. Karena signifikansinya yang kritis dalam rangka pemulihan ekonomi negara dan pembangunan ekonomi jangka panjang, sektor ini telah menarik banyak perhatian pemerintah. Di negara-negara berkembang, sektor pertanian berfungsi sebagai sumber produksi untuk kebutuhan seperti pakaian, tempat tinggal, dan makanan serta sumber pekerjaan bagi sebagian besar orang. Bagian yang signifikan dari sektor pertanian negara dalam Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan pentingnya pertanian bagi perekonomian suatu bangsa. Sebaliknya, jika bangsa ini dianggap sebagai negara industri meskipun kontribusi sektor pertanian terhadap PDB masih minim. Negara ini tetap disebut sebagai negara agraris terlepas dari seberapa besar kontribusi sektor pertaniannya terhadap PDB. (Tati, 2012:23). Perekonomian bangsa telah diuntungkan secara signifikan dari pertumbuhan ekonomi yang difokuskan pada sektor pertanian.

Bagi sebagian besar pekerja di Indonesia, pertanian merupakan sumber pendapatan utama mereka. Perbaikan gizi rumah tangga dan ketahanan pangan, peningkatan kesempatan kerja, dan pengentasan kemiskinan pedesaan adalah semua tujuan pembangunan pertanian. Sebagian besar masyarakat pedesaan mengandalkan hasil panen. Memiliki kelompok tani yang secara signifikan dapat meningkatkan panen padi bagi petani merupakan salah satu pendekatan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup. Kelompok tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat percakapan di antara petani untuk mencari solusi atas banyak masalah yang mereka hadapi solusi melalui pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka terhadap isu-isu yang didampingi oleh pemerintah. Petani belum sepenuhnya mengembangkan dan memberdayakan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). (Tati, 2012:28).

Petani akan mendapatkan keuntungan besar dari kerjasama mereka karena, dengan SDM yang lebih baik, mereka dapat menerima informasi segar para petani seluruhnya. Untuk memajukan pertanian, masyarakat petani harus diberikan alat yang mereka butuhkan untuk membuat lebih banyak kemajuan fisik. Menurut Pasal 1 Bab I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, "Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani dalam melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, pemantapan dan penjaminan luas lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi," Payne dalam Adi, (2008:30) berpendapat bahwa tujuan utama pemberdayaan adalah memberikan kebebasan kepada klien untuk memutuskan sendiri kegiatan apa yang akan mereka lakukan, termasuk meminimalkan dampak hambatan pribadi dan sosial. Hal ini dicapai, antara lain, dengan mentransfer kekuatan dari lingkungannya sambil juga memberinya lebih banyak kepercayaan dan kapasitas untuk menggunakan kekuatan yang sudah dimilikinya. Menurut Shardlow (dalam Adi, 2008: 31), gagasan pemberdayaan pada dasarnya mencakup bagaimana orang mencoba untuk mengambil alih kehidupan mereka sendiri dan berusaha untuk mengukir masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Pemberdayaan petani seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan internal mereka serta memperluas peluang dan akses mereka untuk mendapatkan bantuan dari sumber daya produktif dan pengembangan perusahaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Agenda operasional penyuluhan dan pendidikan pertanian sangat penting. Karena berbagai persoalan yang kadang dihadapi, ekspansi pertanian tidak dapat berjalan semulus yang diinginkan masyarakat Indonesia. Isu-isu tersebut antara lain masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat, yang menuntut keterlibatan pemerintah dalam pembentukan organisasi petani, yang akan memberdayakan masyarakat petani dan meningkatkan produktivitas efektif dan efisien. Melalui organisasi petani, diberikan saran untuk meningkatkan produksi pertanian dalam upaya mencapai target lebih cepat. Menurut Sastraadmadja, jumlah petani yang tersebar di seluruh pelosok desa, dengan demikian diharapkan melalui pengembangan kelompok, akan muncul pemahaman antara kelompok pertanian dan kelompok terampil menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam kegiatan usaha taninya (dalam Mandasari, 2014: 24). Kelompok tani ini dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas dengan pendekatan kelompok, petani dan keluarganya akan menjadi fokus pembangunan pertanian, sehingga mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan. Menurut BPLPP, kelompok tani adalah salah satu bentuk perkumpulan tani yang berfungsi sebagai media penyuluhan dan dimaksudkan untuk lebih fokus pada peningkatan praktik pertanian. (dalam Mandasari, 2014:27).

Dengan bergabung dalam kelompok tani, produsen dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan hasil padi karena organisasi petani berfungsi sebagai forum untuk berbagi informasi dengan petani dan melakukannya dalam pengaturan kelompok. Karena semua kegiatan dan masalah pertanian dapat ditangani melalui kelompok secara bersamaan, kelompok tani juga merupakan wahana pembelajaran organisasi dan kolaborasi antara petani yang memainkan peran penting dalam kehidupan komunitas petani. Berikut adalah tanggung jawab organisasi petani sebagaimana tertuang dalam BAB II Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/permentan/SM.050/12/2016 tentang Pengembangan

Kelembagaan Petani: Pertama, pembelajaran di kelas, khususnya Gapoktan berfungsi sebagai wadah pembelajaran dan pembelajaran dimana peserta dapat meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan pandangan mereka untuk mengembangkan dan membuat perusahaan pertanian mereka sendiri dengan memanfaatkan sumber pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan gaya hidup, pendapatan, dan produktivitas. Kedua, dengan menjaga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, Unit Produksi atau Peternakan setiap anggota secara keseluruhan dapat dikembangkan sebagai unit usaha untuk mencapai skala ekonomi komersial. ketiga Forum Kerjasama atau Gapoktan merupakan wadah untuk mempererat kerjasama, baik antar petani maupun dengan pihak luar, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi usahatani, kemampuan bertahan terhadap risiko dan rintangan, serta profitabilitas.

Petani yang berpartisipasi dalam organisasi petani desa Sumbergondo memerlukan pemberdayaan untuk memungkinkan mereka meningkatkan kualitas hidupnya. Berdasarkan hasil pengamatan di kelompok tani Sumbergondo, kelengkapan alat-alat pertanian masih minim, tidak tersedia sawah atau lahan untuk tes bibit, penyimpanan hasil panen, dan akses usahatani pada modal. Selain itu, infrastruktur yang dimiliki oleh Kelompok Tani Sumbergondo kurang mendukung dan sebagian yang lain memerlukan perbaikan. Selain masalah kelembagaan dengan petani, yang sebagian besar hanya formalitas. Keberadaan kelembagaan yang masih sebatas formalitas dalam hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa kelompok tani yang sudah ada dapat bertemu secara rutin.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk membantu pemerintah desa dalam meningkatkan perencanaan dan evaluasi setiap program kerja yang ada dan memajukan Desa Sumbergondo melalui hasil sektor pertanian sehingga pemerintah sendiri dapat memperoleh manfaat. dan jelas terutama untuk lingkungan sekitar. Penelitian yang dilaksanakan dengan judul **"Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Pemerintah Kota Batu"**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Strategi Pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pemberdayaan kelompok tani di desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
   a. Dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil dari pengamatan langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selain di perguruan tinggi.
   b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya dalam topik yang relevan.
2. Manfaat praktis
   a. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran dalam proses pemberdayaan masyarakat.
   b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah desa Sumbergondo dalam pemberdayaan kelompok tani.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. *2013*. Teori-teori Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Adi, Isbandi Rukminto.2008.Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

David, Fred, R . 2011. Strategic Management Manajemen *Strategi* Konsep,. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.

Ferianti, I. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi Melalui Program Kelompok Tani (Studi pada Kelompok Tani Sumbersari di Dusun Sumbersari Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu). Skripsi. Bandar Lampung: UNIVERSITAS LAMPUNG. Diakses 25 November 2020, dari http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/310 71

Langi, Jova E. "Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Kasus di Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan)1." *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, vol. 2, no. 6, 2015.

Mandasari, D.J Widodo. 2014. Strategi Pemasaran Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) Batik Magenda Tamanan Kabupaten Bondowoso. Jurnal Pendidikan ekonomi 13 (1)

Rangkuti, Freddy. ((*2009*). Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis. Kasus. Integrated Marketing Communication. Jakarta : PT. GramediaPustakaUtama

Siagian, Sondang. P. (*2016*). Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan ke-24. Jakarta: Bumi Aksara.

Suhariyanto. 2017. Analisis Risiko Produksi Usahatani Padi Sawah di Provinsi Bali. Jurnal Agr Volume 1 No. 2. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif Dan R & D. Bandung : Alfabeta. 456 hal.

Sumodiningrat, G. 2016. Membangun Indonesia dari Desa. Yogyakarta: Media Pressindo

Tati ,Nurmala dkk. 2012. Pengantar Ilmu Pertanian. Yogyakarta:Graha Ilmu.